

BAB IV

**BERBAGAI PERTIMBANGAN INDONESIA MENJALIN KERJASAMA
MILITER DENGAN RUSIA (2004-2009)**

Ada beberapa faktor yang mendasari Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kerjasama militer dengan Rusia pada tahun (2004-2009). Sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia untuk memodernisasi peralatan militer dalam negeri, Rusia dinilai pilihan yang tepat sebagai mitra kerjasama militer di lihat dari tiga faktor yaitu politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional.

A. Politik Dalam Negeri

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, bahkan Indonesia telah banyak melewati masa-masa krisis dan telah melewati masa reformasi. Sejarah demi sejarah itu membuktikan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang selalu mampu mengatasi tantangan zaman. Setiap cobaan yang dialami bangsa ini ternyata mampu membuat Indonesia lebih tegar. Setiap krisis yang dihadapi membuat bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Setiap tantangan yang silih berganti membuat rakyat Indonesia lebih bersatu. Kurun waktu yang panjang itu telah memberikan banyak pelajaran, termasuk tentang bagaimana membangun negeri ini.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia dibawah pemerintahan SBY baik jangka panjang maupun menengah, pemerintah berupaya mengajak segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan program-program dan kebijakan pemerintah.

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu presiden putaran II pada tanggal 20 september 2004. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pensiunan jenderal bintang empat dan lulusan terbaik Akabri pada tahun 1973. beliau menekuni dunia militer hingga melanjutkan pendidikan militernya di Airbone dan Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976). Susilo Bambang Yudhoyono pun dipercaya menjabat di Yonif 744 Dam IX/Udayana(1986-1988). Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada masa pemerintahan Presiden KH.Abdurahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben Karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan mengenai militer merupakan kekhawatiran yang muncul di tengah kehidupan masyarakat Indonesia semenjak terpilihnya SBY pada tahun 2009 melalui pemilihan umum. Mengingat, SBY merupakan lulusan dari AKMIL itu berarti

beliau memiliki latar belakang militer. Namun, ternyata kekhawatiran rakyat Indonesia ditanggapi baik oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono Karena beliau mendukung dengan dihapuskannya dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI merupakan, doktrin yang diterapkan oleh pemerintah orde baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua fungsi, yakni menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwi fungsi sekaligus untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintah Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan public nasional secara permanen.²¹

Demokrasi dalam pemerintahan SBY, memberikan ruang yang maksimal kepada semua lapisan elemen masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas Mahasiswa untuk mengaspresiasi pendapat dan inovasinya ke dalam pembangunan nasional Indonesia.

Bagi presiden SBY, mengawal demokrasi merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi dan tidak ada kompromi terhadap otoritisme. Karena, demokrasi merupakan sebuah instrument untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia. Hal ini ditandai dengan solidaritas, kepedulian, kebersamaan, kekompakan dalam mendukung pemimpin yang telah dipilih masyarakat untuk menjalankan tugas negara. Karena, sejauh ini sistem demokrasi lah yang

²¹ "Politik Luar negeri pada masa pemerintahan SBY". Diakses dari : www.kompasiana.co.id.

terbukti paling baik dalam menjamin hadirnya kebebasan. Dan kebebasan yang dimaksud tentunya dengan menghargai hak-hak dan kebebasan orang lain, serta dengan menghargai ketertiban dan tatanan hukum yang berlaku (*the rule of law*).

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan demokrasi, presiden SBY melakukan prioritas yang diarahkan pada pelaksanaan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (reformasi birokrasi) yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*). Pemerintah yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain; keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsive, dan membuka partisipasi masyarakat.

Selain itu, untuk membangun pemerintahan yang beribawa, presiden SBY telah melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui:

- (a) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes, dan responsive.
- (b) Peningkatan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pemerintahan.

- (c) Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (d) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan system karier berdasarkan prestasi.
- (e) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.²²

Dalam masa pemerintahannya, SBY melakukan beberapa kebijakan politik di antaranya yaitu;

1. Menganut Konsep Trias Politica

Trias politica merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut berbagai negara di belahan dunia. Dengan konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda; Legislative, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislative adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan suatu negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan

²² Budi, Gogor. 2009. "*Rapor Biru Presiden SBY*", Jakarta. Hal 61

sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh suatu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Walaupun demikian, jalannya Trias Politica di setiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.

Konsep Trias Politica (Legilatif, Eksekutif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY, mengalami perubahan yang progresif dimana perubahan tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui pemilu untuk memilih anggota Dewan Legislative, dan Pilpres untuk pemilihan elit Eksekutif, sekalipun untuk elit Yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.

2. Sistem Kepartaian

Di Indonesia, selama masa pemerintah SBY di tahun 2004-2009, system kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila

secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.

3. Politik Pencitraan

Politik pencitraan merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan ini hampir semua pemimpin suatu negara di dunia, termasuk presiden SBY. Sebagai pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga image baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, presiden SBY melakukannya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal.

Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya. Yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis retorika, presiden SBY dinilai mengimplementasikan retorika tipe *elucotio*, dimana pembicara memilih kata-kata dan Bahasa yang tepat ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal dalam politik pencitraan SBY berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukkan presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya berimplikasi terhadap rasa simpatik masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya dengan kampanye, dan introduksi prestasi positif presiden SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.

Melihat dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa politik dalam negeri pada masa pemerintahan SBY lebih mengedepankan demokrasi dan pro ke rakyat. Di samping itu, politik dalam negeri pada masa pemerintahan SBY menginginkan adanya partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kepentingan nasional tak terkecuali masalah keamanan yang menjadi sorotan negara Indonesia. Indonesia memiliki berbagai ragam suku dan budaya yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakatnya. Terlebih Indonesia kaya akan sumber daya alam yang membuat negara-negara maju tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia.

Untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Indonesia dari gangguan pihak-pihak yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia, presiden SBY mengambil kebijakan politik dalam negeri untuk menjalin kerjasama militer dengan negara Rusia yang saat ini kekuatannya hampir menyamai kekuatan Amerika Serikat.

Kerjasama antara Rusia dan Indonesia di pengaruhi politik dalam negeri dimana presiden RI yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang dari kemiliteran. Sebelum SBY menjabat sebagai

presiden Indonesia, kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam bidang militer sudah beberapa kali dijalankan. Seperti pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia telah menjalin kerjasama militer dengan Rusia. Kerjasama kedua negara berlangsung cukup baik ditandai dengan pembelian pesawat Sukhoi dari pihak Indonesia.

Pada masa pemerintahan SBY barulah kerjasama antara Rusia dan Indonesia semakin terlihat dengan jelas. Kedua kepala negara bersepakat untuk melanjutkan kerjasama yang sempat tertunda dan membentuk suatu badan yaitu Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTMM), yang ditandatangani dalam sidang komisi pertama di Rusia pada tanggal 27 september 2005.

Kebijakan presiden SBY untuk melanjutkan kembali kerjasama pertahanan dan keamanan militer dengan Rusia dipengaruhi oleh keinginan untuk meningkatkan system pertahanan dan keamanan yang dimana telah di atur dalam peraturan presiden No.7 tahun 2005. Indonesia perlu melakukan kerjasama militer yang lebih mendalam dikarenakan luas wilayah dan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah sehingga perlu bagi pemerintah Indonesia untuk memperketat keamanan wilayah Indonesia dari gangguan luar.

Latar belakang presiden SBY dari kalangan militer, secara tidak langsung ikut mempengaruhi politik dalam negeri Indonesia pada saat itu. Mengingat pentingnya keamanan wilayah Indonesia dan belum

memadainya peralatan teknik militer dalam negeri membuat presiden SBY mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama di bidang militer dengan rusia. Rusia dipilih sebagai salah satu mitra kerjasama strategis dikarenakan Rusia dan Indonesia adalah rekan bisnis pasca kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Rusia memiliki militer yang tidak kalah jika di bandingkan dengan militer negara-negara Eropa yang tentunya dari harga dan cara pemakaian jauh lebih mahal di bandingkan dengan Rusia.

Kebijakan politik dalam negeri mengenai kerjasama bidang militer dengan Rusia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan banyak dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya untuk menarik perhatian dunia internasional untuk ikut bekerjasama sama dengan Indonesia. Keputusan presiden SBY dalam menjalin kerjasama bidang militer dengan Rusia di dukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat Indonesia di pemerintahan. Sekaligus membuka mata dunia bahwa selama ini Indonesia di anggap bergantung dengan Amerika dapat ditepis.

B. Kondisi Ekonomi dan Militer

Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra

laut, yaitu jalur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi).

Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah mereka.

Indonesia merupakan bangsa yang baru merdeka pada tahun 1945 akan tetapi, negara-negara barat baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada beberapa tahun kemudian setelah Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya di dunia Internasional. Di saat belum mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain, Indonesia berjuang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan cara menarik perhatian dunia internasional akan sumber daya alam Indonesia yang melimpah di sepanjang Nusantara.

Barulah pada tahun 1960 an negara-negara barat mulai tertarik dan menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Letak yang strategis yang berada di jalur sutra sangat menguntungkan Indonesia. Banyak para pedagang

singhah dan memilih menetap di Indonesia Karena melihat peluang ekonomi yang semakin maju di jalur sutra Indonesia. Pedagang yang menetap di Indonesia membawa dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan yang masih sangat rentan dengan kemiskinan dan pengangguran. Para pedagang yang berasal dari berbagai negara itu sedikit ikut mengikuti arus ekonomi Indonesia. Sehingga sedikit demi sedikit pengangguran di Indonesia dapat teratasi dan masyarakat Indonesia semakin aktif dalam dunia perdagangan.

Seiring berjalannya waktu, masalah perekonomian kembali terjadi di Indonesia yang tengah merintis pembangunan ekonominya. Pada tahun 1997, kembali terjadi krisis ekonomi di tandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dollar yang luar biasa, serta menurunnya pendapatan per kapita yang sangat drastis atau yang lebih di kenal dengan sebutan krisis moneter. Kecendrungan melemahnya rupiah semakin menjadi ketika terjadi penembakan mahasiswa trisakti pada tanggal 12 mei 1998. Inflansi terjadi dimana-mana yang semakin memperkeruh suasana negeri ini pada tahun itu, banyak perusahaan asing dan perusahaan rakyat pribumi yang hampir bangkrut atau disita oleh kreditor menyusul utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998, dan terpaksa memberhentikan karyawannya Karena tidak bisa membayar upah mereka dan akibatnya terjadi PHK dimana-mana yang membuat masyarakat semakin menjadi-jadi dengan aksi demo massa. Penjarahan barang-barang milik para pedagang tak bisa di hindarkan dan di

cegah. Massa semakin memberontak hingga memboikot jalan-jalan raya dengan membakar ban dan berteriak tentang keadilan di negeri ini dan menyalahkan pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu.²³

Tidak banyak yang dapat pemerintah lakukan pada saat itu Karena krisis pada tahun itu jauh lebih parah dan kompleks dibandingkan dengan krisis-krisis yang sebelumnya dialami Indonesia. Hal ini di buktikan dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden. Kerusuhan mei 1998, mengakibatkan kehancuran di berbagai sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden selama 34 tahun membuat Indonesia memulai kehidupan baru berupa perubahan sistem politik dari demokrasi terpimpin ke demokrasi liberal atau yang lebih sering dikenal dengan zaman reformasi.

Memasuki zaman reformasi merupakan babak baru kehidupan bagi Indonesia, lahirnya kebijakan-kebijakan baru baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan lainnya membuat perubahan yang berarti dalam aspek kehidupan. Seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia mulai mengalami perkembangan yang berarti. Kepala pemerintahan pun telah silih berganti untuk membenahi kehidupan di negara ini, sampai akhirnya Indonesia memilih kepala negara dengan cara pemilu itu yang berarti untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presiden sesuai dengan pilihan hati nurani mereka. Melalui pemilu secara serentak di Indonesia, terpilih lah Susilo

²³ "Kilas Balik Krisis 1998" diakses dari : www.kompasiana.com.

Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia 2004-2009 dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk melanjutkan pembangunan yang sempat tertunda di masa pemerintahan sebelumnya.

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Dimana pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan pesat seiring pemulihan ekonomi pasca peristiwa krisis global yang terjadi sepanjang 2008 sampai 2009. Hal ini ditandai dengan perekonomian Indonesia mampu bertahan di tengah ancaman pengaruh dari krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa.

Capaian pembangunan dalam lima tahun terakhir, telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang masuk dalam kelompok 20 negara dengan PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di dunia, kelompok negara-negara maju OECD (Organization of Economic Cooperation Development), telah menempatkan Indonesia sebagai negara dalam kategori *Enhanced Engagement Countries*, yaitu negara yang harus makin ditingkatkan keterlibatannya dengan negara-negara maju.²⁴

Dari kondisi yang terpuruk beberapa tahun silam, Indonesia kini telah berubah menjadi bangsa yang dinamis dan penuh harapan. Indonesia telah pulih dari krisis moneter yang dulu melumpuhkan perekonomian Indonesia. Kini, Indonesia telah melaksanakan reformasi yang menyeluruh di berbagai sektor.

²⁴ Budi, Gogor, loc. Cit.

Indonesia telah berhasil menjalani transisi demokrasi ketiga terbesar di dunia. Demokrasi telah dijalankan bukan hanya sebatas pada tataran prosedural Pemilu dan Pilkada namun juga telah menjadi bagian dari budaya politik baru yang dirayakan secara bersama.

Sementara itu, munculah ekonomi gelombang keempat (*fourth way economy*). Dimana dunia pada saat ini memasuki tren ekonomi kreatif, ekonomi berbasis budaya, ekonomi-lingkungan, ekonomi-warisan. Melihat fenomena ini, presiden SBY memutuskan untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Ini mengingat Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berdaya saing ekonomi kreatif merupakan perpaduan antara *arts*, kreativitas, inovasi kita dan tentunya memerlukan *back up* teknologi.

Oleh karena itu, SBY selalu menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, untuk membangun dan meningkatkan ekonomi kreatif; *heritage economy*, *cultural based economy*, *eco economy*, yang semuanya itu sangat kaya untuk dikembangkan di negeri ini. Industri kerajinan merupakan salah satu bidang yang penting untuk dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan industri kreatif di tanah air. Dalam kerangka industri dan perdagangan global, industri kerajinan oleh pemerintah selama ini terus mendorong agar dapat memenuhi standar kualitas serta tuntutan dari pasar, baik pasar domestic maupun pasar internasional.

Sungguh langkah yang tepat dalam perkembangan ekonomi Indonesia, Karena inilah sesungguhnya tulang punggung ekonomi kerakyatan. Tulang punggung dari koperasi, usaha kecil dan menengah yang bisa memiliki jaringan kerjasama dengan usaha besar. Para pelaku industri kerajinan telah menghasilkan berbagai ragam kerajinan tangan. Mulai dari anyaman hingga kerajinan emas dan perak. Ekonomi berbasis budaya ini tentu saja mengasumsikan pentingnya upaya melestarikan kebudayaan Indonesia.

Pencapaian demi pencapaian ekonomi membuat bangsa Indonesia semakin mantap melangkahkan kaki untuk menjalin kerjasama internasional. Tawaran kerjasama dari negara lain pun semakin banyak berdatangan. Ini merupakan suatu keberhasilan yang sejak dulu lama di cita-citakan Indonesia. Namun dibalik keberhasilan itu semua ternyata Indonesia masih memiliki beban negara yang entah sampai kapan akan berakhir. Beban itu adalah hutang luar negeri Indonesia, walaupun Indonesia telah mencicil hutang tersebut sejak sebelum krisis moneter melanda aka tetapi, seakan hutang luar negeri Indonesia tidak ada habisnya.

Menyikapi hal itu, presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono memilih Rusia sebagai mitra kerjasama militer dikarenakan dilihat dari sisi ekonomi Indonesia yang sedang berkembang Rusia di anggap memenuhi pra syarat dalam kerjasama militer. Dimana Rusia memiliki peralatan militer yang canggih dan modern serta hampir menyamai peralatan militer Amerika Serikat dan harganya jauh lebih murah dan mampu Indonesia

beli di bandingkan dengan peralatan militer dari Amerika yang harganya pun jauh lebih mahal.

Pemerintah telah berupaya keras untuk mewujudkan perkembangan ekonomi yang merata dan keamanan stabilitas wilayah agar semakin memberikan rasa aman untuk warga Indonesia melakukan aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan. Keberhasilan di bidang ekonomi terlihat dengan Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dengan pesat seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.

Sementara itu kondisi militer di suatu negara penting untuk di garis bawahi, Karena laju ekonomi suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik jika kondisi militer suatu negara baik dan mampu memberikan rasa aman pada masyarakatnya. Baik di pusat maupun perbatasan wilayah, terlebih negara yang memiliki wilayah seperti Indonesia yang merupakan negara yang luas dan hampir setengah wilayah dari Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang sangat menguntungkan Indonesia sebagai jalur transportasi perdagangan. Dengan begitu, pemerintah Indonesia membutuhkan pengamanan wilayah yang lebih ketat dan peralatan militer yang memadai guna menciptakan rasa aman dan menghindari serangan pihak asing yang ingin masuk ke Indonesia.

Melihat dari sejarah-sejarah masa lalu Indonesia, kondisi militer Indonesia sendiri dapat dikatakan tidak stabil. Di karenakan pemerintah

terdahulu kurang berfokus pada militer melainkan berupaya membenahi perekonomian Indonesia terlebih dahulu. Di hapuskannya peran dwi fungsi pada ABRI sedikit banyak mengubah sistem politik Indonesia sebelumnya. Sedikit demi sedikit pemerintah mulai berupaya memperbaiki tatanan militernya, walaupun belum sepenuhnya ada kemajuan pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi militer dalam negeri. Mengingat di awal tahun 2000 an banyak terjadi terror yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2004, setelah Indonesia memilih presiden baru melalui Pemilu yang untuk pertama kalinya di adakan di Indonesia terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pilihan rakyat. Dengan latar belakang sebagai pensiunan Jenderal bintang empat, SBY tentu akan memberikan perhatian besar pada militer Indonesia. Namun, bukan berarti SBY akan bertindak tidak adil dengan mengedepankan semua urusan negara demi militer Indonesia yang tangguh. Setidaknya ada harapan Indonesia untuk menjadi negara yang di segani dengan negara tetangga dalam bidang militer sehingga terror bom dan pembajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dihindari.

Sebagai bagian dari profesionalitas dari aparatur negara, profesionalitas TNI merupakan aspek yang sangat vital. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, dengan posisi geografis yang amat strategis, tentu memerlukan sistem pertahanan yang tangguh. Sistem pertahanan yang didukung oleh tantara yang kuat dan professional akan memancarkan daya

tangkal yang tinggi. Tantara yang “ditakuti lawan”, “disegani kawan”, dan “dicintai rakyat”. Tantara yang berada di garda terdepan, dalam mempertahankan setiap jengkal tanah di negeri tercinta ini.²⁵

Dalam membangun kemampuan tangkal yang cukup pemerintah memberikan perhatian besar pada pembangunan kekuatan TNI, agar mampu menjadi komponen utama pertahanan nasional yang tangguh dan handal. Meskipun anggaran pertahanan Indonesia masih terbatas, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan anggaran TNI, terutama yang berkaitan dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Kesejahteraan prajurit termasuk para pensiunan TNI secara terus menerus telah ditingkatkan. Upaya ini penting dilakukan, mengingat keberadaan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit yang makin meningkat, akan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI, termasuk meningkatnya moril prajurit untuk mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh negara.

Sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara, SBY mendorong TNI untuk membangun paradigma baru dan melaksanakan reformasi internalnya. Reformasi, yang antara lain, telah mengembalikan peran utama TNI, sebagai pengawal kedaulatan negara. TNI tidak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. TNI tidak lagi terjun dalam aktivitas lain di

²⁵ Ibid., halaman 76

luar bidang pertahanan. Transformasi seperti ini sangat penting, agar TNI dapat semakin efektif dan professional dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Karenanya, reformasi TNI tidak boleh terhenti, dan harus terus dilanjutkan.²⁶

Di sisi lain, peran TNI telah terlihat dengan ikut aktif memprakarsai dan mendorong berjalannya reformasi nasional dan transisi demokrasi. Sejalan dengan paradigm baru dan reformasi internalnya. TNI telah, menempatkan peran dan tugas utamanya sebagai pelindung bagi kedaulatan dan integritas bangsa dan Negara Republik Indonesia (NKRI). Keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan negara antara lain mendukung tegaknya demokrasi. TNI juga dikembangkan secara profesional dengan mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi dan supermasi sipil. TNI tetap bersikap netral terhadap semua kekuatan politik dan memiliki komitmen yang kuat sebagai perekat bangsa. Selain itu, TNI kembali menjadi stabilisator dalam keadaan dinamis. Ini berbeda dengan masa orde baru, yang berfokus pada keamanan stabilisator yang statis. Stabilisator sekarang dimaksud untuk membantu POLRI atas permintaan, maupun memberi saran dalam rangka menciptakan stabilitas yang sehat.²⁷

Demokrasi tidak mungkin berlangsung tanpa keamanan. Ini menunjukkan bahwa TNI telah ikut menciptakan kondisi bagi berkembangnya

²⁶ Budi, Gogor. Loc. Cit.

²⁷ "Perubahan Peran TNI" . diakses dari : www.vivanews.co.id.

demokrasi dengan bersikap akomodatif terhadap peran partai sebagai penyalur aspirasi rakyat dalam mewujudkan demokrasi. Keadaan ini berbeda dengan masa lalu, ketika militer digunakan sebagai alat kekuasaan. Saat itu, militer menghalangi partisipasi rakyat dan menghambat pembangunan demokrasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa TNI dengan paradigma baru dan reformasi internalnya telah berhasil memainkan peran sebagai stabilisator yang dinamis. Keadaan ini seterusnya akan mewujudkan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya demokrasi.

Sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia terutama setelah hampir empat belas tahun diembargo oleh sejumlah negara produsen khususnya Amerika Serikat menunjukkan kondisi yang sudah tidak layak digunakan. Sudah seharusnya pemerintah meremajakan secara bertahap semua alat utama sistem senjata atau alutsista yang tidak layak pakai dan membayakan keselamatan prajurit. Dapat dikatakan separuh kekuatan peralatan utama sistem persenjataan atau alutsista TNI tidak sanggup beroperasi secara maksimal. Penyebabnya, baik Karena faktor usia peralatan maupun terbatasnya komponen dan suku cadang alutsista.²⁸

Kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran yang ada mengharuskan Indonesia melakukan kerjasama alih teknologi alat-alat militer dengan negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi kemiliteran yang

²⁸ Budi, Gogor, op.cit. halaman 80

jauh lebih maju daripada Indonesia. Mencabut Amerika Serikat mencabut secara penuh embargonya memerlukan waktu yang lama, sementara kebutuhan pertahanan Indonesia semakin mendesak. Alasan inilah yang mendasari Indonesia mencari mitra baru dalam kerjasama militer, dan pilihan yang tepat untuk menjalin kerjasama militer yaitu dengan Rusia.

C. Konteks Internasional

Politik Luar Negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional. Dengan demikian, politik luar negeri tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya tergantung pada tujuan nasional masing-masing negara.

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif, artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.²⁹

Kebijakan politik luar negeri Indonesia akan menentukan kualitas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan diplomasi. Dimana kegiatan diplomasi ini penting untuk

²⁹ "Politik bebas aktif Indonesia". Diakses dari: www.tempo.com.

dilakukan oleh Indonesia mengingat kepentingan nasional dalam negeri yang semakin bertambah mengikuti perkembangan zaman. Politik luar negeri juga sebagai bentuk siasat sebuah negara untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain agar tercapainya kebijakan luar negeri sesuai kepentingan nasional negara tersebut.³⁰

Politik luar negeri sebuah negara dapat berubah-ubah sepanjang masa pemerintahan presiden atau kepala negara yang sedang memerintah di negara tersebut. Tak terkecuali politik luar negeri Indonesia, yang selalu berubah sejak masa pemerintahan Soeharto hingga presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat Indonesia di pimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau menyampaikan mengenai konteks politik luar negeri Indonesia yang menyangkut aspek domestic dan aspek kawasan. Dalam aspek domestik termasuk pula demokrasi dan reformasi. Yang artinya, semakin terkondonsolidasi demokrasi di Indonesia, maka akan semakin terbukanya kesempatan islam berdampingan dengan modernitas.³¹

Demokrasi di Indonesia tentu akan memicu demokrasi di negara-negara lain. Demokratisasi dalam politik luar negeri Indonesia ditegakkan melalui peran DPR RI dan juga melalui peran civitas akademika serta seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini pers dan media ikut berperan penting dalam hal

³⁰ Rudi Hartono, "Menilai Politik Luar Negeri Indonesia", diakses dari: www.lmnd-online.org pada tanggal 31 maret 2017

³¹ Ayo belajar- Pendidikan Kewarganegaraan, Kanisius, Yogyakarta, 2009

pembentukan opini publik agar masyarakat memahami perkembangan luar negeri dan arah perspektif luar negeri terhadap Indonesia.³²

Sehingga masyarakat mampu memberikan masukan terhadap isu Hubungan Internasional yang perlu diperhatikan Indonesia. Keberadaan otonomi daerah serta pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia yang tengah jadi sorotan Internasional. Dimana saat ini, Indonesia memiliki perkembangan ekonomit terpesat di Asia setelah RRT dan India. Indonesia juga telah berhasil melewati berbagai krisis global yang tengah menimpa beberapa waktu lalu. Hal ini dalam konteks regionalisme internasional, Indonesia telah menjadi bukti kebangkitan negara-negara Asia, konstelasi dengan negara G-20 dan ASEAN sebagai poros utama kawasan. Dengan ini membuktikan bahwa kini Indonesia dipandang aman oleh pihak Internasional.

Saat ini dengan adanya perubahan hubungan dengan negara-negara barat dan perubahan dengan negara-negara komunis maupun mantan komunis, terdapat pula perubahan isu-isu yang menjadi konsentrasi utama. Pemerintah Indonesia, kini mengarahkan politik luar negerinya kepada isu-isu HAM, demokrasi, lingkungan hidup, ketahanan pangan, krisis energi dan krisis hutang di Eropa.

Pendekatan politik luar negeri oleh presiden SBY memiliki ciri sebagai berikut:³³

³² "Peran Pers dan Media di Indonesia", di akses melalui www.okezone.com. 31 maret 2017

³³ Faisal, Sanafiah.2010. "Sistem Politik Indonesia", CV. Rajawali . jakarta

1. Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.
2. Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.
4. Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan pertimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
5. Soft power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara-cara halus dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara lain.
6. Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap-tiap negara untuk mengambil hati dan menjalin persahabatan.

Dengan pendekatan yang beliau anut pada masa pemerintahannya, presiden SBY menerapkan politik luar negeri yang konstruktive untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan semboyan *all directions foreign policy* (politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga menganut paham *A million friends zero anemy* yang artinya merangkul sebanyak-

banyaknya kawan dengan menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh.³⁴

Instrument-instrument yang digunakan Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain ialah partisipasi Indonesia dalam forum-forum kawasan maupun internasional seperti ASEAN, PBB, G-20, APEC, ASEM maupun WTO. Di samping itu kunjungan kenegaraan berbagai kepala negara asing ke Indonesia juga mencitrakan semakin bertumbuhnya kepercayaan Internasional terhadap Indonesia dan semakin banyak hubungan bilateral yang mampu dijalin pemerintah Indonesia dengan luar negeri.

Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak ke satu arah melainkan ke segala arah dan bersifat bebas aktif, yang artinya Indonesia bebas menjalin kerjasama Internasional dengan berbagai negara selama kerjasama tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Maka, kerjasama Indonesia dalam bidang militer setelah beberapa kali mendapat embargo militer dari negara Eropa dan Amerika, Indonesia memutuskan untuk menjalin kerjasama bidang militer dengan Rusia.

Pengadaan alutsista dari Rusia merupakan pilihan yang tepat saat industri strategis dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan kelengkapan peralatan dan teknologi militer. Menggunakan produk Amerika Serikat atau Eropa, selain harganya lebih mahal juga selalu ada hambatan politis yang bisa

³⁴ Faisal, Sanafiah. Loc, Cit.

menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Rusia umumnya tidak sulit soal lisensi, izin dan politik. Pembelian alutsista dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, umumnya dirumitkan dengan persyaratan penegakan HAM (dikaitkan masalah Aceh, Poso, atau Papua), masalah lisensi, dan prosedur pembelian yang rumit. Pengalaman dengan Inggris misalnya, tank scorpion dan panser sebu stromer untuk operasi menumpak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak boleh dipakai di Aceh Karena terkait syarat kerjasama hanya untuk pertahanan luar.³⁵

Kerjasama pembelian perlengkapan dari Rusia dinilai paling menguntungkan. Selain prosesnya tidak rumit, pembelian langsung pada badan yang ditunjuk pemerintah dapat menghemat anggaran 40 persen, Karena tanpa melalui perantara ataupun pialang. Sistem pembayaran yang diajukan pemerintah Indonesia salah satunya dengan sistem imbal beli autsista. Imbal beli alutsista dengan komoditas batubara di Indonesia. Misalnya, memberikan kesempatan bagi pemerintah dan pengusaha Rusia untuk berinvestasi dalam eksplorasi batubara di Indonesia, bukan menukar komoditas batubara dengan alutsista.³⁶

Rusia dalam menjual produk pertahanan militer sama kualitasnya dengan produk yang Rusia sendiri gunakan, tidak ada istilah *downgrade*. Tidak

³⁵ Antara , “RI-Rusia Jajaki Kerjasama Teknologi Pertahanan”. Diakses dari: www.antara.co.id pada tanggal 3 maret 2017.

³⁶ *Ibid*

seperti Amerika Serikat, setiap produk yang dijual, beberapa fitur dikurangi Karena takut kalah saing. Rusia juga tidak keberatan dalam hal transfer teknologi dan modifikasi teknologi yang dilakukan oleh Indonesia. Sebagai contoh, pihak Rusia lupa menyertakan adaptor pengisian bbm pesawat, akhirnya teknisi Indonesia melakukan sedikit modifikasi pada adaptor pengisian bbm milik A-4 skyhawk, dan akhirnya Sukhoi bisa terbang perdana dari pangkalan TNI AU. Pihak rusia sama sekali tidak keberatan dengan hal ini.

Beberapa alasan Indonesia memilih Rusia sebagai negara produsen persenjataan militer terbaru bagi TNI dibanding dengan beberapa negara lainnya yaitu, pertama didasari oleh faktor sejarah hubungan militer Indonesia-Rusia. Kedua, dilihat dari segi kemudahan persyaratan kerjasama bidang pertahanan militer dari Rusia sendiri. Ketiga, dikarenakan Rusia lebih fleksibel mengenai harga dimana bisa dibayar dengan komoditi yang dimiliki oleh Indonesia. Keempat, Rusia memiliki teknologi militer yang sepadan jika dibandingkan dengan Eropa dan USA. Rusia memiliki kekuatan infanteri yang dapat diunggulkan sehingga Indonesia dapat mengadopsi system militer melalui kerjasama yang dilakukan sekarang.³⁷

Kerjasama dengan Rusia bukan hanya sekedar kerjasama biasa, melainkan Indonesia belajar dan menyerap ilmu-teknologi dari Rusia. Rusia dikenal memiliki reputasi sebagai negara yang cukup efektif dalam alih

³⁷ Bambang H, "*Indonesia Mengenal Hubungan Militer dengan Rusia*", diakses dari: www.politikindonesia.com. pada tanggal 4 april 2017

teknologi. Sebagai contoh, negara India dan China telah memproduksi pesawat tempur berkat kerjasama teknik militer dengan Rusia. Indonesia juga berharap dengan adanya kerjasama pertahanan militer dengan Rusia dapat memproduksi pesawat tempur sendiri seperti India dan China.

Kerjasama dengan Rusia merupakan salah satu cara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam bidang persenjataan yang saat ini sudah mencapai 70 persen. Akibat embargo militer dari Amerika terhadap Indonesia hampir empat belas tahun, mengakibatkan kondisi alutsista TNI buatan Amerika Serikat sangat buruk, Karena tidak adanya pemeliharaan dan perawatan suku cadang dari Amerika yang digunakan oleh TNI berakhir dengan kecelakaan yang menewaskan para prajurit TNI yang seharusnya tewas Karena membela tanah air Indonesia, bukan tewas akibat sistem yang sudah kadaluarsa.³⁸

Sasaran pengadaan alutsista serta pemeliharaannya pada tahun anggaran 2004-2009 adalah meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara yang integrative baik jalur laut, udara, dan darat. Terkait hal tersebut perlu mengganti alutsista yang sudah kadaluarsa dengan persenjataan berteknologi tinggi atau modern

³⁸ Wisnu Dewabrata, *"Kerjasama Militer, Embargo Senjata dan Kondisi Alutsista TNI"*, diakses dari : www.melanesianews.org . pada tanggal 4 april 2017.

dengan mempertahankan kualitas senjata guna mencapai kekuatan pokok minimum.³⁹

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia dalam pengadaan peralatan militer diharapkan menjadi model kerjasama militer selanjutnya bagi kedua negara. Pengadaan alutsista di Indonesia saling membutuhkan secara berjenjang. Dilihat dari pengamatan yang dilakukan angkatan, pengajuan dilakukan Mabes TNI, dan keputusan yang diambil oleh Departemen Pertahanan (Dephan). Rusia dan Indonesia saling membutuhkan satu sama lain. Dengan tujuan yang sama, yaitu perdamaian dunia, keamanan dan kemakmuran.

³⁹ Departemen Pertahanan. *“Kenaikan Anggaran Pertahanan 2010 Fokus ke Alutsista”*, diakses dari : www.dephan.com. Pada tanggal 4 april 2017.